

Peran Swasta Membantu Pembiayaan Pendidikan Tinggi: Telaah atas UU Pendidikan Tinggi

Narasumber:

Pakar Kelautan dan Dewan Pendidikan Jawa Timur ,
Prof. Daniel M. Rosyid PhD, M. RINA.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud,
Patdono Suwignjo
Presiden BEM ITS, Zaid Marhi Nugraha



Waktu:
Kamis, 2 Mei 2013
10.00-12.30 WIB

Tempat:
Student Community Centre
Institut Teknologi Sepuluh Noverber,
ITS Surabaya



Bisa mengenyam pendidikan tinggi adalah cita-cita seluruh anak bangsa di negeri ini. Tapi kadang biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mahal bisa jadi batu penghalang. Sementara pemerintah menyatakan belum sanggup membiayai sepenuhnya. Membebankan pada mahasiswa terlalu tinggi tentu sama saja dengan menjegal cita-cita banyak anak bangsa. Karena itu pemerintah tak boleh berhenti pada kata "belum sanggup."

UU Pendidikan Tinggi Nomer 12 Tahun 2012 menawarkan pemecahan masalah itu dengan mengatur skema pembiayaan pendidikan tinggi. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi, pihak industri dan swasta diminta ikut bahu membahu membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adanya peran swasta seperti yang diatur pasal 86 dalam UU Pendidikan Tinggi ini boleh jadi jalan keluar lain persoalan pembiayaan pendidikan tinggi. Tapi kemudian muncul pertanyaan, sejauh mana bantuan pihak swasta itu bisa diberikan? Apakah tidak berpengaruh pada otonomi kampus? Bukankah kehadiran industri ini akan membuka jalan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan?

GRATIS
Makan Siang!!

Hanya untuk 150 Peserta
Informasi lebih lanjut hubungi:



CP : Edgar, 0813 804 631 34
Iqbal, 085716064940

KBR68H-TEMPO TV

Jl. Utan Kayu No. 68 H Jakarta Timur 13120



KBR68H.
Tempo televisi



@PORTALKBR
@Tempo_TV



www.portalkbr.com
www. tempo-tv.com

www.manajemenpendidikantinggi.net